

Optimalisasi Penganggaran Keuangan Daerah di Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun Provinsi Sumatera Utara

Ramy Afifah Rangkuti¹, Decky Dwi Utomo², Elvira Mulya Nalien³

Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 16 April 2025

Revised: 31 Mei 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Keywords:

Budget

Finance

Optimization

ABSTRACT

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian anggaran keuangan daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang diperoleh secara komprehensif, yang kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan jelas. Jenis pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari data tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Padangsidimpun Selatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sebelumnya telah berjalan dengan baik. Sedangkan informasi terbaru ini dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan cara mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas pengeluaran, Kecamatan Padangsidimpun Selatan melakukan perubahan perencanaan anggaran. Anggaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan. Tanpa adanya anggaran yang memadai, memungkinkan suatu rencana maupun program kerja pemerintah tidak dapat tercapai dengan baik. Anggaran membantu dalam merencanakan juga memprioritaskan pengeluaran keuangan. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran perlu dilakukan perubahan perencanaan anggaran keuangan sesuai dengan prioritas rencana program kerja pemerintah di Kecamatan Padangsidimpun Selatan.

This paper aims to determine the optimization of the regional financial budget carried out by Padangsidimpun Selatan District, Padangsidimpun City, North Sumatera Province. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach. The analysis technique used in this study is a descriptive analysis technique that is obtained comprehensively, which is then described so that a systematic and clear picture is obtained. The type of data collection is done by interview and observation. From the previous year's data, it can be concluded that regional financial management in Padangsidimpun Selatan District which includes planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and financial supervision has previously been running well. While this latest information with the existence of a budget efficiency policy as an effort by the government to optimize the use of state funds by reducing waste and increasing the effectiveness of spending, Padangsidimpun Selatan District has made changes to budget planning. The budget plays a very important role in the implementation of government work programs. Without an adequate budget, it is possible that a government plan or work program cannot be achieved properly. The budget helps in planning and prioritizing financial expenditures. Therefore, in line with the existence of budget efficiency policies, it is necessary to make changes to financial budget planning in accordance with the priority of the government's work program plan in Padangsidimpun Selatan District.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ramy Afifah Rangkuti

Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat,

Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh No.KM.14, Tabek Panjang, Kec. Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26192

Email: ramyafifah04@gmail.com

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah

kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa salah satu syarat teknis pembentukan kecamatan adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan tersebut tercermin dari rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang tidak melebihi 50%. Ketentuan ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang efektif di tingkat kecamatan sebagai bagian dari keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada kecamatan untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan, termasuk keuangan, sesuai prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi keuangan yang baik di tingkat kecamatan sangat krusial untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemerintahan secara efektif. Seperti disampaikan oleh Pona et al. (2022), administrasi keuangan yang baik menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji proses optimalisasi penganggaran keuangan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan, strategi, serta peran aktor kunci dalam pelaksanaan anggaran di tengah kondisi efisiensi dan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Situasi ini menuntut kecamatan untuk melakukan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang adaptif dan tepat sasaran. Secara spesifik, penelitian ini menelaah sejauh mana peran camat dan jajaran kelurahan dalam menyusun, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan anggaran secara partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Misalnya, Mulyani et al. (2022) menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam optimalisasi keuangan daerah, sedangkan Bahar et al. (2022) menggarisbawahi peran pengawasan internal dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan utama studi-studi tersebut adalah belum adanya kajian mendalam pada tataran kecamatan sebagai unit terkecil pemerintahan yang memegang peran strategis dalam implementasi kebijakan publik. Penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada analisis struktural di tingkat kabupaten/kota, dengan sedikit perhatian terhadap implementasi langsung di lapangan oleh perangkat kecamatan yang menghadapi realitas operasional dan sosial secara lebih kompleks.

Studi oleh Kurniawati dan Darmawan (2023) menunjukkan bahwa kendala dalam penganggaran di tingkat kelurahan dan kecamatan sering kali terkait dengan kurangnya kapasitas perencanaan partisipatif serta lemahnya mekanisme pelaporan keuangan. Padahal, menurut Widianingsih & Morrell (2007), partisipasi publik dalam penganggaran daerah dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan fiskal lokal. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut pada tingkat mikro. Hal ini diperkuat pula oleh hasil studi Supriyadi & Yuliani (2021) yang menekankan bahwa tantangan teknis seperti akurasi data perencanaan dan alokasi belanja operasional sering kali tidak teridentifikasi dalam kerangka kerja anggaran makro.

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur (research gap) dalam skala mikro, khususnya pada konteks kecamatan, yang belum banyak dijelajahi oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada kelembagaan di tingkat kabupaten/kota, sementara praktik-praktik penganggaran di kecamatan, termasuk interaksi antara camat dan lurah serta strategi teknokratis yang digunakan untuk mengakomodasi efisiensi anggaran, masih luput dari perhatian. Dengan menempatkan kecamatan sebagai fokus analisis, penelitian ini mendorong pembacaan ulang atas struktur penganggaran publik dari sisi pelaksana langsung, bukan hanya perencana di tingkat atas.

Kebaruan dari penelitian ini secara eksplisit terletak pada penelusuran praktik konkret pengelolaan anggaran oleh pemerintah kecamatan di tengah tantangan pemangkasan anggaran nasional, dengan menggambarkan dinamika internal dan strategi adaptasi yang dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aktor lokal, termasuk camat dan para lurah. Studi ini juga mengeksplorasi secara rinci bagaimana penguatan transparansi dan efisiensi diterapkan secara lokal dalam kondisi sumber daya yang terbatas, sehingga menghasilkan pemahaman baru mengenai inovasi fiskal berskala mikro.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan model manajemen keuangan yang aplikatif dan adaptif di tingkat kecamatan, yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta memperluas partisipasi publik dalam siklus anggaran daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi akademik, tetapi juga

memberikan arahan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah daerah dalam konteks efisiensi fiskal dan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, struktur organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Metode ini sesuai untuk menelusuri bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diimplementasikan dalam praktik nyata di lingkungan pemerintahan tingkat kecamatan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Camat Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dalam waktu satu bulan yaitu dari 9 April s.d. 8 Mei 2025. Dalam penelitian ini, peneliti memilih memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses dan strategi optimalisasi anggaran daerah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara secara mendalam dan observasi langsung.

Wawancara dilakukan terhadap camat, staf keuangan kecamatan, dan beberapa lurah sebagai informan kunci, sementara observasi diarahkan pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta mekanisme pelaporan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perencanaan anggaran kecamatan, laporan keuangan, dan notulen rapat koordinasi dengan Bappeda Kota Padangsidempuan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil analisis bersifat sistematis dan konsisten dengan fenomena yang diamati di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi penganggaran keuangan sangat penting dilakukan agar pelaksanaan rencana dan program kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Sari dan Wahyuni (2025), efektivitas anggaran sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan keuangan daerah. Perencanaan yang matang dan terarah memungkinkan pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama saat menghadapi keterbatasan fiskal. Hal ini semakin relevan sejak diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran daerah oleh pemerintah pusat pada tahun 2025, yang mengharuskan seluruh pemerintah daerah di Indonesia melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran belanja mereka.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, di mana data dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menunjukkan terjadinya pengurangan anggaran belanja daerah sebesar 0,56%. Pagu anggaran belanja Pemerintah Kota Padangsidempuan pada tahun 2024 yang semula sebesar Rp953,05 miliar dikurangi sebesar Rp5,39 miliar, sehingga pada tahun 2025 menjadi Rp947,66 miliar. Pengurangan ini memengaruhi seluruh pos belanja seperti belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya seperti bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Dampak kebijakan tersebut juga dirasakan di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2025, diketahui bahwa anggaran belanja yang dialokasikan ke Kecamatan Padangsidempuan Selatan mengalami pengurangan sekitar 10%, dari Rp14,150 miliar menjadi Rp12,770 miliar. Pengurangan ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan kecamatan, terutama dalam memastikan keberlanjutan program-program prioritas.

Menghadapi situasi ini, Camat Padangsidempuan Selatan mengambil langkah strategis dengan memperkuat perencanaan anggaran yang bersifat partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Nasution dan Lutfi (2022) yang menyatakan bahwa penganggaran partisipatif mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran, sekaligus mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Melalui pendekatan ini, camat melibatkan seluruh lurah dari 12 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan: Kelurahan Losung, Ujung Padang, Sitamiang, Sitamiang Baru, Wek I, Wek II, Wek III, Wek IV, Aek Tampang, Padangmatinggi, Padangmatinggi Lestari, dan Silandit.

Hasil dari koordinasi dan kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penganggaran dilakukan dengan mengevaluasi kembali program-program prioritas kecamatan. Misalnya, program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program unggulan, diketahui mengalami keterbatasan dalam alokasi dana yang berakibat pada kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan anggaran operasional yang tersedia. Hal serupa juga terjadi pada program perjalanan dinas, yang kemudian diminimalisir dengan menggantinya melalui pemanfaatan teknologi komunikasi daring seperti Zoom Meeting untuk efisiensi biaya.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan dengan mengurangi pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) secara signifikan pada seluruh kelurahan di wilayah kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan (2025), efisiensi belanja operasional merupakan bagian dari strategi reformasi fiskal yang mendorong anggaran lebih produktif dan berorientasi hasil (*output-based budgeting*).

Di sisi lain, optimalisasi penganggaran juga dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian terbaru oleh Anjarwati dan Mulyana (2023) menunjukkan bahwa transparansi anggaran mendorong akuntabilitas fiskal dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Salah satu bentuk transparansi ini diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan.

Meskipun Kecamatan Padangsidempuan Selatan telah menjalankan proses penganggaran dengan pendekatan partisipatif dan transparan, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Menurut Azhari et al. (2022), tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia terletak pada konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang akurat serta tepat waktu.

Dengan demikian, optimalisasi penganggaran di Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan proses yang kompleks namun strategis. Pengurangan anggaran yang terjadi akibat kebijakan nasional memaksa pemerintah kecamatan untuk mengubah pendekatan manajerial ke arah yang lebih kolaboratif, efisien, dan berbasis kebutuhan. Keterlibatan pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran dalam situasi fiskal terbatas.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan anggaran di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan telah memiliki kerangka kinerja yang cukup terstruktur dan fungsional. Walaupun dalam aspek pelaksanaan anggaran Kecamatan Padangsidempuan Selatan masih mengalami sejumlah tantangan yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan program. Namun, Kecamatan Padangsidempuan Selatan tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam optimalisasi anggaran. Dalam hal ini menunjukkan peran fungsional yang struktur dan terorganisasi. Dan didukung oleh komitmen para pimpinan di wilayah administrasi Kecamatan Padangsidempuan Selatan dalam pengelolaan keuangan yang ada. Komitmen para pimpinan dengan memprioritaskan alokasi anggaran kepada rencana dan program-program kerja yang unggul dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Yang tentunya dengan

pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan keuangan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Dalam hal ini, Kecamatan Padangsidempuan Selatan sangat disarankan untuk mengembangkan mekanisme perencanaan yang lebih efektif dan inklusif, tertamanya dalam mengartikulasi serta mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara lebih terstruktur ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

REFERENSI

- Anjarwati, S., & Mulyana, A. (2023). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 11(1), 45–58.
- Azhari, R., Hamzah, I., & Nurhayati, S. (2022). *Analisis Kendala Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 122–130.
- Bahar, A. N., Risal, M. C., & Hisbullah. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Melalui Peran Pengawas Internal*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(3), 560–567.
- Kurniawati, D., & Darmawan, D. (2023). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran di Tingkat Kelurahan*. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Lokal*, 5(2), 112–124.
- Maria Yulia Dua Pona, Magdalena Silawati Samosir, Magdalena Silawati Samosir, & Imelda Virgula Wisang. (2022). *Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka*. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(1), 07–18. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i1.203>
- Mulyani, F. S. P., Fahmi, M. P., Wulandari, S., Rasyid, Y., & Ahyaruddin, M. (2022). *Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi*. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 32–52. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12837>
- Nasution, R. A., & Lutfi, M. (2022). *Public Involvement in Budget Transparency in Terms of Opportunities and Challenges*. [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/361111111).
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 10–28.
- Putra, W. (2020). *Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 41–55.
- Salam, R. (2020). *Analisis Dinamika Permasalahan Implementasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.109>
- Sari, M., & Wahyuni, L. (2025). *Efektivitas Perencanaan Keuangan dalam Optimalisasi Anggaran Daerah*. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 9(1), 30–40.
- Supriyadi, A., & Yuliani, D. (2021). *Evaluasi Sistem Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja di Tingkat Kecamatan*. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 45–59.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory budgeting in Indonesia: A case study of community involvement in public finance*. *Policy Studies*, 28(1), 1–20.